

**RESPON TURKI TERHADAP PELANGGARAN HAM MINORITAS MUSLIM
UIGHUR YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
TIONGKOK 2009-2010**

Oleh :

Siti Nida Laylia

Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Abstract

The Uyghurs are an ethnic group living in the western part of China. The presence of different ethnic Uyghurs with ethnic Chinese majority and Uyghur ethnic refusal to become part of China resulted in pressure from the Chinese Government. The existence of Chinese government pressure is causing resistance and ethnic Uyghur separatism.

The Chinese government's actions sparked protests and demonstrations from ethnic Uyghurs, leading to the biggest unrest that occurred on July 5, 2009. Turkey, which has primordialism ties to Uyghurs from historical, cultural, linguistic and religious affiliations, reacted strongly through the protests of Prime Minister Erdogan and Turkish public through demonstrations and mass media. But in September 2010, the two countries conducted joint military exercises on Turkish invitations and were followed by the highest-level visits by the two countries' elites, as well as ties between the two countries, with cooperation in various fields initiated by Turkey and China.

Using a conceptual framework of motivations that encourage a country to react to ethnic conflicts involving its ethnic ties, the study concludes that there are factors other than affective factors that influence Turkey's attitude toward the Uyghurs who inhabit the Xinjiang region and Turkish relations and its relationship with China .

Keywords : ethnicity, Turkey, Uyghur, China, policy, foreign policy

Pendahuluan

Salah satu wilayah bangsa Turki di Asia Tengah, East Turkestan, merupakan wilayah yang terletak di sebelah barat Tiongkok dan berbatasan langsung dengan Tiongkok. Pasca pembagian wilayah Asia Tengah, Uni Sovyet di bawah kepemimpinan Stalin pada saat itu memberikan salah satu wilayah kediaman bangsa Turki tersebut, yaitu wilayah East Turkestan kepada Mao Zedong, dengan penyerahan wilayah tersebut, maka East Turkestan telah menjadi milik Cina di bawah kekuasaan Mao Zedong. Wilayah East Turkestan yang dihuni oleh orang - orang Turki Uighur hingga kini mendiami wilayah tersebut, yang sekarang disebut Xinjiang atau Sinkiang. Pasca runtuhnya Uni Soviet, negara - negara Turki di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Kyrgyztan menerima kemerdekaan dan kini mereka menjadi negara berdaulat, namun tidak demikian halnya dengan East Turkestan, etnis Uighur di dalamnya terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Tiongkok dan dengan adanya resistansi tersebut, pemerintah Tiongkok terus melakukan tekanan terhadap etnis Uighur yang mendiami Xinjiang.

Etnis Muslim Uighur merupakan kelompok etnis minoritas terbesar di Tiongkok, dengan jumlah kurang lebih sebesar 9,65 juta jiwa dan menduduki wilayah otonomi yang terbesar di Tiongkok, yaitu Xinjiang Uighur Autonomous Region. Pada masa lampau Xinjiang yang terletak diantara perbatasan kerajaan - kerajaan besar pada abad 18, yaitu Tiongkok, India dan Rusia merupakan sebuah wilayah yang kaya akan peninggalan - peninggalan budaya dan sekarang wilayah Xinjiang berbatasan dengan beberapa negara.

Etnis Uighur berasal dari salah satu etnis Proto - Turki yang mendiami Asia

Tengah, mereka memiliki kesamaan budaya, sejarah dan agama dengan etnis - etnis Turki lain yang mendiami Asia Tengah hingga Republik Turki. Kedekatan mereka berasal dari adanya keturunan yang sama dan hal tersebut menciptakan suatu rasa primordialisme yang kuat diantara bangsa Turki, meskipun kini mereka telah terpecah menjadi beberapa negara berdaulat. Perbedaan etnisitas antara Uighur dan Han yang ada di Cina pada akhirnya memicu adanya diskriminasi dan kerusuhan. Beberapa demonstrasi yang berujung pada kerusuhan terjadi setelah Xinjiang menjadi bagian dari Cina, terutama pasca meninggalnya Mao Zedong dan berubahnya politik Cina di bawah Deng Xiaoping. Beberapa demonstrasi yang terjadi adalah protes para mahasiswa Universitas Xinjiang di Urumqi pada tahun 1988 dan 1989 yang memprotes represi pemerintah Tiongkok terhadap kebebasan dan kebudayaan mereka, serta meningkatnya tensi di Xinjiang terhadap pemerintah Tiongkok pada tahun 1990an.

Seluruh kerusuhan ini selalu direspon tegas oleh pemerintah Tiongkok dengan menugaskan banyak pasukan di wilayah Xinjiang. Kerusuhan yang terbesar adalah pada tahun 2009, dimana terjadi kerusuhan antara minoritas etnis Uighur dengan etnis Han di Urumqi, Xinjiang. Sekitar tahun 1950 pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan migrasi domestik etnis Han ke wilayah Xinjiang, Migrasi etnis Han menyebabkan banyak etnis Uighur kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan, dalam bidang pendidikan, pemerintah Tiongkok juga memutuskan untuk membatasi kurikulum pendidikan yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan asli Uighur. Etnis Uighur semakin merasa terancam akibat adanya rencana pemerintah Cina untuk melakukan modernisasi terhadap kota Kashgar yang merupakan pusat budaya Uighur.

Tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, terutama terkait dengan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang menciptakan suatu sensitifitas yang tinggi di antara etnis Han dan etnis Uighur. Kerusuhan pada 5 Juli 2009 ini dimulai dari adanya insiden yang terjadi seminggu sebelumnya di sebuah pabrik mainan di timur kota Shaoguan yang terletak di provinsi Guangdong, para pekerja dari etnis Han menganiaya para pekerja Uighur hingga terdapat 2 orang yang tewas dan 61 lainnya terluka akibat adanya rumor pemerkosaan gadis Han yang dilakukan oleh pemuda Uighur. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak etnis Uighur menyerang pusat - pusat bisnis etnis Han dan orang - orang Han di jalanan. Kerusuhan ini berlanjut hingga 6 Juli 2009, namun kali ini etnis Han yang menguasai jalanan dan melakukan vandalisme kepada pusat-pusat ekonomi etnis Uighur seraya meneriakkan seruan untuk menyerang etnis Uighur. Aksi ini pada akhirnya dapat dihentikan oleh petugas keamanan. Meskipun demonstrasi berhasil dihentikan, demonstrasi kembali dilakukan oleh etnis Han pada tanggal 5 dan 6 September 2009 di Urumqi sebagai balasan atas kerusuhan yang dilakukan oleh etnis Uighur, demonstrasi ini dibubarkan paksa oleh petugas keamanan dan mengakibatkan lima orang tewas.

Tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur dan banyaknya korban yang jatuh dalam kerusuhan memunculkan reaksi dari publik dan pemerintah Turki. Dilandasi oleh kedekatan etnis dengan Uighur, Turki bereaksi keras terhadap tragedi tersebut publik Turki melakukan demonstrasi di Ankara dan Istanbul. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan turut menyatakan dukungan terhadap demo anti Tiongkok di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Ankara yang dilakukan untuk memprotes tindakan pemerintah Tiongkok sebagai suatu bentuk genosida dan mengkritik sikap pemerintah Tiongkok

yang cenderung tidak terlalu bereaksi terhadap peristiwa tersebut, PM Erdogan juga mengancam akan membawa isu ini kepada Dewan Keamanan PBB. Selain reaksi dari Perdana Menteri dan masyarakat sipil, media - media di Turki juga memberikan perhatian lebih terhadap tragedi di Xinjiang. Mereka memberitakan peristiwa tersebut dengan lengkap dan memberikan artikel khusus tentang hubungan etnisitas Uighur - Turki serta nasionalisme Turki.

Adanya ikatan primordialisme yang ditimbulkan dari kesamaan - kesamaan tersebut, tercipta suatu afiliasi yang erat dengan Turki. Turki menjadi salah satu tujuan utama dari pelarian Uighur dari Xinjiang. Keberadaan etnis Uighur di Turki tidak dapat dilepaskan dari peran dua pemimpin Uighur yang memimpin pengungsian tersebut, yaitu Isa Yusuf Alptekin dan Mehmet Emin Bugra. Keberadaan mereka di Turki merupakan simbol perjuangan pengungsi Uighur dalam perlawanannya terhadap Tiongkok. Etnis Uighur berhasil mendirikan beberapa organisasi kemerdekaan East Turkestan seperti Eastern Turkestan Refugee Committee (Doğu Türkistan Göçmenler Derneği) pada 1950an dan jurnalnya yang bernama Doğu Türkistan, dan organisasi East Turkistan Foundation atau Doğu Türkistan Vakfı pada tahun 1976 yang mempromosikan budaya dan kehidupan sosial Uighur hingga usaha Alptekin untuk membentuk East Turkestan World National Congress (ETNC) yang diadakan pertama kali di Istanbul pada 1992. Perjuangan dari Alptekin terus menurun dikarenakan usia yang telah lanjut. Selain menurunnya perjuangan Alptekin, tekanan pemerintah Tiongkok terhadap Turki terus meningkat. Dimulai pada sekitar tahun 1990, pemerintah Turki mulai memperketat kegiatan komunitas Uighur dan melarang etnis Uighur terlibat di dalam politik, melakukan pidato - pidato serta memperketat pemberian izin pengungsi. Pada tahun 1993, ETNC telah sepenuhnya

tidak diijinkan untuk mengadakan kongresnya di Turki, kini ETNC memindahkan markas mereka di Munich, Jerman. Namun perpindahan ini masih membuat ETNC tidak efektif, melemahnya organisasi kemerdekaan di Uighur juga diperparah dengan adanya perpecahan dan perbedaan pendapat di dalam organisasi, terdapat pihak yang menginginkan kemerdekaan penuh, namun sebagian hanya menginginkan otonomi yang lebih besar.

Pembahasan

Pasca kerusuhan besar di Xinjiang tanggal 5 dan 6 Juli 2009, Perdana Menteri Erdogan mengecam peristiwa tersebut sebagai “genosida” dan ditindak lanjuti dengan protes publik Turki di depan Kedutaan Tiongkok di Ankara dan Istanbul. Demonstrasi ini berpusat di Caglayan Square untuk menekan pemerintah Turki supaya bereaksi terhadap penindasan etnis Uighur di Xinjiang. Mereka membawa bendera Turki dan menyerukan ikatan etnis, budaya dan agama antara Turki dan Uighur. Protes besar ini dilakukan oleh etnis Uighur yang tinggal di Turki dan publik Turki yang mendukung etnis Uighur.

Demonstrasi dan tuntutan terhadap pemerintah Turki untuk melakukan boikot terhadap Tiongkok dibentuk oleh organisasi East Turkestan yang merupakan wadah asosiasi etnis Uighur di Turki, yaitu East Turkestan Culture And Solidarity Association (DTKDD). Demonstrasi ini dilakukan di depan kedutaan Tiongkok di Ankara. Demonstrasi lain dilakukan di Istanbul, diorganisir oleh organisasi ultranasionalis Alperen Ocaklari, organisasi pemuda dari Great Union Party (BBP), partai sayap kanan Islamis Turki. Ribuan orang melakukan protes di Caglayan Square di Istanbul dan berjalan hingga Konsulat Tiongkok di Istanbul.

Dalam rally tersebut, pemimpin Felicity Party atau Saadat Party yang merupakan

partai Islamis yang anti Barat dan Israel, Numan Kurtumulus, memberikan pidato kecaman terhadap pemerintah Tiongkok. Ia menyatakan bahwa apa yang terjadi di Xinjiang bukanlah konflik etnis, namun konflik agama, sehingga semua orang Muslim harus membela etnis Uighur yang tertindas. Ia juga mendesak pemerintah untuk memanggil duta besar Tiongkok dan memberikan peringatan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Partai Nationalist Great Union Party (BBP), Yalcin Topcu juga menggunakan momen tersebut untuk meminta pemerintah bereaksi atas tindakan pasukan militer Tiongkok.

Kerusuhan di wilayah Xinjiang, Tiongkok, dan penyerangan terus – menerus terhadap minoritas Muslim Uighur hanya memicu respon bisu dari negara – negara muslim. Negara – negara Muslim lebih khawatir merusak ikatan dagang yang menguntungkan dengan Beijing atau khawatir mengundang perhatian yang bakal mengganggu stabilitas politik antar negara.

Negara non – Arab macam Iran dan Turki adalah sedikit yang mengkritik Tiongkok. Iran padahal tengah sibuk menghadapi kericuhan terkait perselisihan pemilu presiden, sementara Turki masih memiliki keterkaitan etnis dengan minoritas muslim Uighur di Tiongkok. Namun, hampir diseluruh dunia Arab dan Timur Tengah, kekerasan Tiongkok hanya menghasilkan reaksi kecil. “Rezim Arab tidak dapat mengkritik serangan terhadap Muslim Tiongkok karena mereka sendiri tidak memiliki demokrasi,” pengamat politik Jordania, Labib Kamhawi.

Tiongkok telah menempatkan puluhan ribu tentara ke wilayah Xinjiang barat dalam beberapa hari terakhir, memberlakukan kontrol ketat di ibukota Urumqi dan mengepung area tersebut setelah kerusuhan etnis menyebabkan 180 orang terbunuh dan 1.680 orang terluka. Muslim Uighur, yang berpopulasi sekitar 9 juta di Xinjiang telah lama mengeluhkan

gelombang etnis Han yang memasuki kawasan dan pembatasan ketat pemerintah terhadap praktek keagamaan Muslim. Mereka menuduh komunitas Han melakukan diskriminasi dan Partai Komunis mencoba menghapus bahasa dan budaya mereka.

Di bawah ideologi yang dibawa AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), politik luar negeri Turki berubah menjadi dua model politik luar negeri yang dinamis. Model yang pertama adalah model strategis tradisional, yaitu hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan negara – negara Eropa. Model strategis yang kedua didasarkan pada faktor ekonomi yang meningkatkan independensi Turki dari Amerika Serikat dan Eropa. Independensi ini diakibatkan oleh tekanan publik terhadap pemerintah AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) untuk menemukan pasar baru, karena pertumbuhan ekonomi yang dinamis berkaitan dengan tumbuhnya golongan menengah dan borjuis Anatolia yang menjadi basis dari konstituen AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan). Tuntutan untuk memperluas pasar juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi sikap aktif AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) dalam mencari kerjasama ekonomi yang menguntungkan di Timur Tengah, negara – negara Balkan dan negara dengan perekonomian yang sedang berkembang pesat seperti Tiongkok.

Sejak dulu, isu Uighur selalu membayangi hubungan bilateral Turki dan Tiongkok. Namun di era Erdogan, hubungan baik dengan Tiongkok menjadi salah satu isu penting, dibuktikan dengan adanya beberapa kunjungan resmi yang menjadi agenda kedua negara. Eratnya hubungan Turki dan Cina ini akan membawa keuntungan ekonomi yang tidak sedikit bagi Turki. Beberapa kerjasama yang akan dilakukan adalah melalui kerjasama perdagangan dimana Tiongkok merupakan mitra impor terbesar ketiga bagi Turki, sedangkan bagi Tiongkok, Turki

hanya menduduki peringkat ke – 20 dari negara yang menjadi target impor Tiongkok periode 2009. Untuk menutupi deficit neraca Turki terhadap Tiongkok, kedua negara sepakat untuk menggunakan Yuan dan Lira Turki dalam perdagangan bilateral serta perjanjian perdagangan untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral antara Turki dan Tiongkok dari USD 17 Miliar kepada USD 50 miliar dalam jangka waktu 5 tahun. Keuntungan lainnya adalah pada pembangunan infrastruktur dan railway di Turki.

Perusahaan konstruksi Tiongkok, Chinese Civil Engineering Construction Corp. telah memulai pekerjaannya untuk membangun rel sepanjang 533 km di Istanbul – Ankara yang memperpendek waktu tempuh kedua kota dari 7 jam menjadi 3 jam. Pemerintah Tiongkok juga memberikan pinjaman sebesar USD 1,28 miliar untuk pembangunan rel dari Inonu dan Kosekoy yang melewati teras – teras pegunungan dan direncanakan akan dibuka pada tahun 2013.

Kerjasama antara Turki dan Tiongkok dalam pembangunan rel kereta cepat ini merupakan awal dari proyek besar yang digagas Tiongkok. Tiongkok memiliki ambisi untuk membangun sebuah jalan rel cepat yang akan menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah (melewati Kazakhstan), Rusia dan Eropa Barat untuk memperluas pasar Tiongkok menuju Eropa.

Dalam ambisinya tersebut, Tiongkok akan membutuhkan Turki untuk menempatkan jalur relnya sebagai jalan masuk ke Eropa. Rel yang dibangun Tiongkok di Turki akan menjadi penghubung dari kota Kars kepada batas timur Armenia dan berlanjut ke dekat batas Yunani dan Bulgaria kemudian ke negara – negara Uni Eropa. Untuk rencana selanjutnya, Turki dan Tiongkok telah mengadakan pembicaraan untuk membangun jalur rel kedua. Turkey States Railways, agensi Turki yang menangani setiap pembangunan jalur rel kereta cepat,

menyatakan rencana Turki untuk membangun 6000 kilometer jalur kereta cepat pada 2023, tepat pada perayaan 100 tahun berdirinya Republik Turki. Proyek ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk ambisi Tiongkok membangun kembali Jalur Sutra Modern yang pada masa lampau digunakan sebagai jalur perdagangan yang melintasi Asia, Eropa dan Timur Tengah untuk mencapai pasar – pasar yang potensial di kawasan – kawasan tersebut. Jalur Sutra modern ini direncanakan akan melintasi beberapa daerah di Tiongkok, tepatnya daerah Liangyungang, via Xinjiang dan Asia Tengah, melintasi Timur Tengah dan Turki. Dalam rencana ini, Turki merupakan salah satu negara terpenting yang memegang peran sebagai pintu masuk ke pasar Eropa. Pembangunan Jalur Sutra Modern ini juga akan menguntungkan Turki karena Turki juga berencana akan membangun jalur Trans – Eurasia yang akan menghubungkan Turki dengan sisi Asia dan sisi Eropa. Jika jalur ini berhasil dibuat, maka Turki akan memperpendek transportasi ke Tiongkok dan Asia Tengah hingga 50%.

Selain dalam kerjasama perdagangan, Turki juga akan memperoleh keuntungan dalam rencana pembangunan reaktor nuklirnya. Kunjungan PM Erdogan ke Cina pada tanggal 9 April 2012 tersebut juga digunakan untuk menandatangani kesepakatan kerjasama pembangunan dan penelitian nuklir antara kedua negara, dan yang kedua adalah Perjanjian Penggunaan Nuklir Secara Damai. Peningkatan kerjasama nuklir antara Turki dan Cina dilakukan mengingat kebutuhan Turki untuk mencari partner yang sesuai untuk pembangunan reaktor nuklir keduanya yang terletak di provinsi utara Sinop. Terdapat kandidat lain selain Cina yaitu Rusia, Korea Selatan dan Jepang. Namun Cina merupakan salah satu partner terkuat karena Cina bersedia membangun reaktor nuklir di Sinop tanpa adanya jaminan seperti yang diminta oleh Korea Selatan.⁹⁷ Keuntungan lain yang akan didapatkan

Turki adalah dari keinginan Turki untuk bergabung dengan Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang beranggotakan Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas dan meminimalisir ancaman terorisme antar batas wilayah. Saat ini Turki memiliki keinginan untuk bergabung dengan SCO akibat ketidakpuasannya terhadap Uni Eropa.⁹⁸ Dalam SCO, Cina merupakan sebuah kekuatan besar di dalamnya mengingat posisinya sebagai pendiri SCO. Pada Juli 2012, Cina melalui Presiden Hu Jintao memberikan persetujuan untuk menjadikan Turki sebagai dialogue partner SCO.⁹⁹ Turki menyadari arti penting dari Cina dan Rusia untuk pembangunan berkelanjutan Turki serta keinginan Turki untuk bergabung dengan SCO dan mencapai tujuan sebagai salah satu negara 10 World's Top Economy.

Terdapat perubahan sikap pemerintah Turki pada saat kerusuhan di Xinjiang pada tahun 2009. Bermula dari kecaman keras Perdana Menteri Erdogan terhadap Tiongkok dan reaksi – reaksi dari publik Turki, hingga pada akhirnya sikap Turki mengalami perubahan terhadap Tiongkok. Perubahan sikap Turki ditandai dengan peningkatan kerjasama dan kunjungan – kunjungan yang diadakan oleh elit kedua negara. Etnisitas antara Uighur dan Turki kurang berpengaruh karena dilandasi oleh pertimbangan – pertimbangan lain selain faktor afektif, yaitu faktor instrumental yang dapat dikategorikan dalam politik domestik, keuntungan ekonomi dan kondisi internasional. Faktor afektif merupakan faktor – faktor yang melihat ikatan etnis dalam arti kesamaan sejarah, budaya, dan agama.

Lemahnya ikatan etnis dalam perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Tiongkok dipengaruhi oleh semakin kuatnya faktor instrumental. Faktor instrumental yang dimaksud meliputi politik domestik, kondisi

internasional dan keuntungan ekonomi. Faktor domestik dilihat dalam dua hal yaitu siapakah pihak yang melakukan protes terhadap tindakan pemerintah Cina dan sifat sekuler – multi dimensional dari politik luar negeri Turki dibawah partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan). Pelaku protes adalah bukan konstituen partai AKP (Keadilan dan Pembangunan), yang merupakan partai berkuasa. Para pemrotes adalah konstituen Partai BBP (Partai Lokal Turki), MHP dan Partai Saadat yang berideologi Islamis dan ultranasionalis Pan-Turkisme. Sebaliknya, konstituen AKP lebih bersifat sekularis dan Islam moderat yang tidak terlalu terpengaruh dengan isu-isu etnisitas. Konstituen AKP pun memiliki perbandingan lebih banyak dibandingkan dengan partai-partai lain sehingga isu etnisitas ini cenderung tidak terlalu berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan partai. Dari faktor politik luar negeri, di bawah AKP Turki berlandaskan pada sekularitas dan memiliki ideologi yang berlandaskan multi-dimensional, dimana pemikiran tersebut mengakibatkan Turki tidak lagi terpaku pada AS dan Eropa, namun ke timur seperti negara-negara Timur Tengah, Balkan dan Asia Timur. Cina merupakan salah satu negara yang dianggap penting dalam politik luar negeri AKP, mengingat kekuatan ekonomi Cina dan kebutuhan Turki untuk mencari pasar baru untuk meningkatkan perekonomiannya.

Dalam faktor kondisi internasional, meningkatnya kekuatan Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia serta menurunnya perekonomian negara-negara Eropa turut mendorong Turki untuk mempertimbangkan hubungannya dengan Cina. Dalam keuntungan ekonomi, Turki mendapatkan banyak keuntungan dari kerjasama strategis dengan Cina, seperti kerjasama perdagangan, pembangunan proyek railway yang menjadi proyek besar Turki, pembangunan Jalur Sutra Modern untuk memperkecil waktu transportasi dari

Asia ke Eropa dan sebaliknya, pembangunan reaktor nuklir yang dibutuhkan Turki serta keanggotaan SCO dimana keanggotaan ini akan memperdalam kerjasama Turki dengan negara-negara kaya energi di Asia Tengah untuk menutupi kebutuhan Turki yang semakin meningkat akan energi.

Selama abad ke-21 Etnis Uighur telah menggelar ribuan protes mengungkapkan keluhan mereka mengenai apa yang mereka anggap tindakan yang diskriminatif oleh pemerintah. Diskriminasi di segala bidang tersebut menimbulkan bentrokan sengit di Urumqi pada tahun 2009. Pada tanggal 5 Juli, terjadilah bentrokan besar di Urumqi antara Han Tiongkok, Uighur dan polisi.

Bentrokan yang mematikan tersebut mengundang perhatian dan memunculkan reaksi publik dunia dan khususnya pemerintah Turki. Turki adalah negara sekuler namun populasinya mayoritas ialah Muslim dan adanya persamaan linguistik dan religi dengan Etnis Uighur. Turki juga merupakan negara yang menjadi tempat tinggal sejumlah besar diaspora Uighur. Selain itu, bendera resmi Turki presiden, memiliki 16 bintang di atasnya, yang mewakili 16 Great Turkic Empires dan salah satunya ialah Etnis Uighur.

Respon yang berasal dari Turki diawali dengan adanya pernyataan pada tanggal 6 Juni. Kementerian Luar negeri Turki mengatakan bahwa:

“Ini adalah harapan kami bahwa orang – orang yang bertanggung jawab untuk insiden ini akan ditemukan secepatnya dan dibawa ke pengadilan. Kami percaya bahwa tindakan yang diperlukan akan diambil untuk mencegah insiden semacam ini di masa depan Tiongkok, sebuah negara pada cara untuk menjadi lebih stabil dan makmur. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada rakyat Daerah Otonomi Uighur Xinjiang pada khususnya dan kepada orang – orang Tiongkok pada

umumnya, kepada keluarga mereka yang kehilangan nyawa mereka dan ingin cepat sembuh bagi yang terluka."Selanjutnya pada hari Jumat setelah konflik terjadi. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, merespon konflik tersebut dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan semacam genosida. "The event taking place in Tiongkok is a kind of genocide, we have difficulty understanding how Tiongkok's leadership... can remain a spectator in the face of these events". Turki terus melakukan protes terhadap kekerasan Uighur di wilayah Tiongkok.

Menteri Perindustrian Turki Nihat Ergun telah meminta masyarakat Turki untuk berhenti membeli barang-barang Tiongkok meskipun pemerintah sendiri tidak memiliki rencana untuk memboikot secara resmi. Namun dengan cepat menambahkan bahwa ini adalah sikap pribadi tanpa persetujuan pemerintah. Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu, sementara itu, disebut temanya Tiongkok, menyampaikan keprihatinan Turki, berdasar laporan kantor berita Anatolia.

Sebelum adanya komentar genosida Erdogan, media telah mengkritik sikap pemerintah Ankara terlalu lembut akan Konflik Xinjiang. Editorial di harian Sabah mengatakan bahwa Turki Uighur setidaknya harus mendapatkan simpati yang sama ditunjukkan untuk Palestina dari Gaza, hal tersebut mengacu pada kemarahan Erdogan kepada Presiden Israel Shimon Peres di forum Davos tahun 2009 setelah perang Gaza. Kritik yang sama juga muncul dari Devlet Bahceli, pemimpin Partai Aksi Nasionalis (MHP), mengkritik pemerintah Turki yang tidak memanggil duta besar Tiongkok untuk memprotes perlakuan Beijing terhadap Uighur. Bahceli mengatakan bahwa Erdogan cepat dalam mengambil sikap yang kuat terhadap krisis di Gaza dan Palestina, menyampaikan undangan untuk Hamas dan mempromosikan organisasi ini dalam berbagai platform internasional, namun ia

tetap diam atas pembantaian terhadap Etnis Uighur.

Selain respon Turki yang berasal dari Pemerintah Turki maupun orang-orang yang berada di pemerintahan. Respon juga berasal dari masyarakat Turki yang menyebabkan protes besar di jalan. Ribuan warga Turki melakukan aksi protes di Istanbul Square untuk mengecam kekerasan yang telah terjadi, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah tindakan penindasan, dan meminta pemerintah mereka untuk campur tangan untuk melindungi Muslim Uighur di sana.

DTKDD, dengan dukungan LSM Turki lain, buru-buru menyelenggarakan protes di luar kedutaan Tiongkok di Ankara untuk mengutuk penanganan pemerintah Tiongkok terhadap kerusuhan. Pemimpin Nasionalis Great Union Party (BBP), Yalcin Topcu meminta pemerintah Turki kembali hubungan dengan Tiongkok dan bahwa parlemen mengutuk tindakan pemerintah Tiongkok. Sementara itu, pro-pemerintah Independent Industrialists and Businessmen's Association (MUSIAD) merilis pernyataan yang menyerukan investor Turki untuk menahan diri dari melakukan bisnis dengan Tiongkok.

Sekitar 5.000 orang, yang diadakan oleh sebuah partai Islam di Turki, berkumpul di Istanbul Caglayan Square, di sisi Eropa dari kota, memegang bendera Turki dan bendera biru-putih dari republik Uighur di tahun 1930-an. Mereka meneriakkan slogan-slogan mengecam kekerasan terhadap warga Uighur dan meminta pemerintah Turki untuk "melindungi saudara-saudara kita." Para pengunjung rasa, sebagian besar anggota partai Islam, juga menyerukan pemboikotan barang-barang Tiongkok, berteriak: "Oh pemerintah tidak tidur, tidak makan kejam Tiongkok!". puluhan warga Uighur berteriak "Allah Maha Besar" ketika mereka mencoba menerobos barikade polisi untuk mencapai gerbang konsulat di Istanbul. Kekerasan yang

dimulai 5 Juli telah memicu protes hampir setiap hari di Turki, terutama di kantor misi diplomatik Tiongkok di Istanbul dan Ankara dijaga ketat di mana beberapa pengunjung rasa telah membakar bendera Tiongkok atau barang buatan Tiongkok.

Pada 30 Agustus 2009, Menteri Dalam Negara Turki Zafer Caglayan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi. Caglayan mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas hubungan antara kedua negara. Caglayan menambahkan bahwa ia menyampaikan pandangan Turki tentang insiden yang terjadi di Urumqi pada 5 Juli dan menimbulkan efek yang dalam. Caglayan mengatakan bahwa menteri luar negeri Tiongkok menjelaskan kepadanya tentang langkah – langkah yang diambil setelah insiden di Urumqi. Caglayan menambahkan bahwa ia juga akan mengunjungi Urumqi. Caglayan mengatakan bahwa Uighur Turki merupakan hal yang penting bagi Turki karena mereka berdua Turki dan Muslim.

Pada tahun 2010, Wen Jiabao, Perdana Menteri Tiongkok, mengunjungi Turki, dalam kunjungan tersebut Tiongkok dan Turki mengumumkan untuk membangun hubungan kerja sama strategis. Perdana Menteri Tiongkok menyatakan bahwa mereka telah menyadari kekuatan Turki dan pengaruhnya di masyarakat internasional dan wilayah sekitarnya. Kedua belah pihak telah menandatangani delapan perjanjian dan memutuskan untuk menetap perdagangan dengan mata uang kedua negara. Mereka merencanakan untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral dari US\$17 miliar dalam 2010 sampai US\$ 50 miliar pada tahun 2015, dan 100 miliar pada 2020.

Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao juga meyakinkan pengusaha Turki bahwa Tiongkok berkomitmen untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi lebih dekat dengan Turki, menjanjikan untuk meningkatkan

perdagangan bilateral menjadi 50 miliar dolar AS dalam lima tahun, menambahkan tujuan dicapai tetapi diperlukan upaya yang gigih. Volume perdagangan antara Tiongkok dan Turki pada tahun 2009 mencapai 10 miliar dolar, dengan surplus mendukung Tiongkok. Untuk mencapai perdagangan yang seimbang dengan Turki, Wen berjanji pengusaha Turki Tiongkok akan mengirim komisi perdagangan lebih ke Turki untuk mengimpor produk yang lebih Turki. Wen juga mengatakan Tiongkok tidak pernah mengejar surplus perdagangan tetapi perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan.

Wen mengatakan bahwa kedua negara dapat menandatangani perjanjian swap mata uang untuk memfasilitasi kerjasama pembiayaan dan pembukaan cabang perbankan di masing – masing negara. Departemen pembiayaan terkait Tiongkok akan membeli obligasi Turki untuk membantu Turki menstabilkan pasar keuangan. Dia menekankan bahwa kedua belah pihak harus mengatasi masalah masing – masing dan melaksanakan dekat pertukaran, konsultasi dan melawan proteksionisme perdagangan. Wen juga menambahkan apabila kerja sama perdagangan Tiongkok dan Turki hanya berlangsung dan akan menikmati prospek besar.

Wen tiba di ibu kota Turki, setelah mengunjungi Yunani, Belgia dan Italia. Selama kunjungan dua hari, Wen mengadakan pembicaraan dengan timplannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan dan menghadiri upacara penandatanganan delapan perjanjian antara kedua negara di sektor seperti perdagangan, transportasi, infrastruktur, komunikasi dan pertukaran budaya.

Xi Jinping, Wakil Presiden Tiongkok, melakukan kunjungan ke Turki pada hari Senin hingga Rabu tanggal 20 hingga 23 February 2012. Kunjungan tersebut merupakan upaya lebih meningkatkan kerja sama perdagangan dan

ekonomi antara Tiongkok dan Turki. Xi tiba di Turki pada Senin malam untuk kunjungan resmi atas undangan Presiden Turki Abdullah Gul. Wakil Presiden Tiongkok Xi Jinping disambut di Istana Çankaya seperti teman empat puluh tahun. Perjalanan resmi tiga hari Xi ke Turki dimulai dengan kunjungan ke Atatürk Mausoleum dan kemudian Xi pindah untuk bertemu dengan Ketua Turki Grand Majelis Nasional Cemil Çiçek di kantornya. Sebuah upacara penyambutan resmi diadakan dalam kunjungan wakil presiden yang disambut oleh Presiden Gül. Sebelum kedua pemimpin negara melanjutkan untuk mengadakan pertemuan, Gül mendeskripsikan kota Ankara untuk Xi dari balkon Istana. Xi terbang menuju Istanbul pada Selasa sore dan bertemu dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan.

Pada tahun 2012, Turki mendapat status sebagai Dialogue Partner di Shanghai Cooperation Organization (SCO), Organisasi politik, ekonomi dan militer di Eurasia yang dibentuk pada tahun 2001, Dimana anggotanya ialah Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan dan Uzbekistan. Sebagai Dialogue Partner artinya Turki berhak untuk mengambil bagian dalam tingkat menteri dan beberapa pertemuan lain dari SCO, namun tidak memiliki hak suara.

Pada 31 Desember 2013, tercatat sebanyak 540 perusahaan Tiongkok beroperasi di Turki (terutama di sektor perdagangan grosir dan penjualan eceran), 23 kantor penghubung Tiongkok. Menurut data dari Kementerian Ekonomi Republik Turki, 20 sertifikat insentif disusun untuk perusahaan – perusahaan Tiongkok antara 2007 hingga 2014, dengan volume investasi 93 juta TL. Menurut data dari Kementerian Ekonomi Republik Turki, 37 perusahaan Turki beroperasi di Tiongkok dengan volume investasi US\$ 396.3 juta. Selain itu, perusahaan konstruksi Turki dan Tiongkok bekerja sama di negara – negara ketiga di seluruh dunia. Dari tahun 2003 – 2013

hubungan perdagangan Turki dan Tiongkok setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kesimpulan

Perubahan sikap Turki ditandai dengan peningkatan kerjasama dan kunjungan – kunjungan yang diadakan oleh elit kedua negara. Respon Turki terhadap pelanggaran HAM minoritas muslim Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok adalah etnisitas antara Uighur dan Turki kurang berpengaruh karna dilandasi oleh pertimbangan – pertimbangan lain selain faktor efektif, yaitu faktor instrumental yang dapat dikategorikan dalam politik domestik, keuntungan ekonomi dan kondisi internasional. Faktor efektif merupakan faktor – faktor yang melihat ikatan etnis dalam arti kesamaan sejarah, budaya, dan agama.

Lemahnya ikatan etnis dalam perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Tiongkok dipengaruhi oleh semakin kuatnya faktor instrumental. Faktor instrumental yang dimaksud meliputi politik domestik, kondisi internasional dan keuntungan ekonomi. Faktor domestik dilihat dalam dua hal yaitu siapakah pihak yang melakukan protes terhadap tindakan pemerintah Tiongkok dan sifat sekuler – multi dimensional dari politik luar negeri Turki dibawah partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan).

Pelaku protes adalah bukan konstituen partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), yang merupakan partai berkuasa. Para pemprotes adalah konstituen Partai BBP, MHP dan Partai Saadat (Partai lokal Turki) yang berideologi Islamis dan ultranasionalis Pan – Turkisme. Sebaliknya, konstituen AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) lebih bersifat sekularis dan Islam moderat yang tidak terlalu terpengaruh dengan isu – isu etnisitas. Konstituen AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) pun memiliki

perbandingan lebih banyak dibandingkan dengan partai – partai lain sehingga isu etnisitas ini cenderung tidak terlalu berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang dilakukan partai. Dari faktor politik luar negeri, di bawah AKP Turki berlandaskan pada sekularitas dan memiliki ideologi yang berlandaskan multi – dimensional, dimana pemikiran tersebut mengakibatkan Turki tidak lagi terpaku pada AS (Amerika Serikat) dan Eropa, namun ke timur seperti negara – negara Timur Tengah, Balkan dan Asia Timur.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang dianggap penting dalam politik luar negeri AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), mengingat kekuatan ekonomi Tiongkok dan kebutuhan Turki untuk mencari pasar baru untuk meningkatkan perekonomiannya.

Dalam faktor kondisi internasional, meningkatnya kekuatan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia serta menurunnya perekonomian negara – negara Eropa turut mendorong Turki untuk mempertimbangkan hubungannya dengan Tiongkok. Dalam keuntungan ekonomi, Turki mendapatkan banyak keuntungan dari kerjasama strategis dengan Tiongkok, seperti kerjasama perdagangan, pembangunan proyek railway yang menjadi proyek besar Turki, pembangunan Jalur Sutra Modern untuk memperkecil waktu transportasi dari Asia ke Eropa dan sebaliknya, pembangunan reaktor nuklir yang dibutuhkan Turki serta keanggotaan SCO (Shanghai Cooperation Organisation) dimana keanggotaan ini akan memperdalam kerjasama Turki dengan negara – negara kaya energi di Asia Tengah untuk menutupi kebutuhan Turki yang semakin meningkat akan energi.

Daftar Pustaka

Jurnal

Muhammad Fajrin Saragih. Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM terhadap

Muslim Uighur di Cina ditinjau dari Hukum Humaniter, *Jurnal Karya Ilmiah*, Departemen Hukum Internasional, 2015.

Prof. Sulaiman, SH, Jonathan Geri Boy dan Makdin Munthe, SH.,M.Hum. Tinjauan Hukum Internasional terhadap perlakuan Diskriminatif terhadap Etnis Minoritas Muslim Uighur di China, Universitas Sumatera Utara, 2013.

Buku

Aktas, Gulbahar Yeken, “Turkish Foreign Policy: New Concepts And Reflection”, (M.Sc. Thesis, Middle East Technical University, 2010)

Bal, Idris, *Turkish Foreign Policy In Post Cold War Era*, (Florida: Brown Walker Press, 2004)

Carment, David, et al, 2009, “The Internationalization of Ethnic Conflict : State, Society and Synthesis”, *International Studies Review* (2009) 11,

Engdahl, F. William, “Eurasian Economic Boom And Geopolitics: China’s Land

Bridge to Europe: The China-Turkey High Speed Railway”, *Global Research* 27